

ABSTRAK

PENGAWASAN HAK PILIH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN OLEH BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG PADA PEMILU 2024 (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)

Oleh

SALWA SALSABILA ADHELANE

Hak pilih merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tetap melekat pada setiap warga negara, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pada Pemilu 2024, terdapat 109 WBP di Lapas Kelas I Bandar Lampung yang tidak dapat menggunakan hak pilih karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga hari pemungutan suara. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis pengawasan hak pilih WBP oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2024. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi, dengan analisis teori pengawasan berdasarkan sifat dan waktu pelaksanaannya, yaitu preventif dan represif menurut Handyaningrat (1986) dalam Sururama dan Amalia (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi preventif, Bawaslu berpedoman pada UU Pemilu, PKPU, dan Perbawaslu; menerbitkan surat imbauan; melakukan koordinasi dengan KPU dan lapas; mendampingi simulasi pemungutan suara; serta memantau pembentukan TPS lokasi khusus. Pada dimensi represif, Bawaslu mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS lokasi khusus. Namun, pengawasan belum optimal secara substantif. Kendala meliputi keterbatasan akses lapas, ketidaklengkapan dokumen kependudukan WBP, tingginya mobilitas WBP, serta keterbatasan kewenangan dalam menyelesaikan masalah administratif sebelum hari pemungutan suara. Kondisi ini menyebabkan pengawasan lebih bersifat administratif dan konfirmatif daripada korektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi kelembagaan dan pengawasan partisipatif yang melibatkan warga binaan dan petugas lapas guna menjamin perlindungan hak pilih yang adil dan setara.

Kata Kunci: Pengawasan, Hak Pilih, Warga Binaan Pemasyarakatan

ABSTRACT

SUPERVISION OF THE VOTING RIGHTS OF CORRECTIONAL INMATES BY BAWASLU OF BANDAR LAMPUNG CITY IN THE 2024 ELECTION (A Study at Class I Correctional Institution of Bandar Lampung)

By

SALWA SALSABILA ADHELANE

The right to vote is a human right inherent in every citizen, including Correctional Institution Residents (WBP). In the 2024 Election, there were 109 WBP in Bandar Lampung Class I Prison who were unable to exercise their right to vote because they were not registered on the Permanent Voter List (DPT) until election day. This study aims to examine and analyze the supervision of WBP voting rights by the Bandar Lampung City Election Supervisory Agency (Bawaslu) in the 2024 Election. The study used a descriptive qualitative method through interviews and documentation, with an analysis of supervision theory based on the nature and time of its implementation, namely preventive and repressive according to Handayani (1986) in Sururama and Amalia (2020). The results of the study show that in the preventive dimension, Bawaslu is guided by the Election Law, PKPU, and Perbawaslu; issues an appeal letter; coordinates with the KPU and prisons; assists with voting simulations; and monitors the formation of special location polling stations (TPS). In the repressive dimension, Bawaslu supervises the voting and vote counting process at special location polling stations. However, oversight is substantively suboptimal. Obstacles include limited prison access, incomplete population documents for inmates, high mobility of inmates, and limited authority to resolve administrative issues before election day. These conditions result in oversight being more administrative and confirmatory than corrective. Therefore, strengthening institutional synergy and participatory oversight involving inmates and prison officers is necessary to ensure fair and equal protection of voting rights.

Keywords: Supervision, Voting Rights, Correctional Facility Residents